OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN MELALUI PENERAPAN *TAPPING BOX* DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Herdian Zuriat Komalasari
NPP. 33.0642
Program Studi Keuangan Publik
Email : herdian.komalasari@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Andi Fitri Rahmadany, S.IP, M.Tr.IP
Email : afitri.rahmadany@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement* (*Kesenjangan Penelitian/Research Gap*):** *Entertainment tax is one of the important sources of Local Own-Source Revenue (PAD) in West Lombok Regency. To improve tax administration and monitoring, the local government has implemented a tapping box system to record taxpayers' transactions automatically. However, despite the increase in the number of entertainment taxpayers and improvements in tax reporting transparency, entertainment tax revenue has not consistently reached the targets established by the government. Revenue realization remained fluctuating during the implementation period, indicating that the utilization of tapping box has not yet produced optimal results. Previous studies have primarily focused on the effectiveness of tapping box in improving taxpayer compliance, while limited research has examined its role in optimizing entertainment tax revenue in a regency-level government context.* ***Purpose: *This study aims to analyze the optimization of entertainment tax revenue through the implementation of tapping box in West Lombok Regency.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, documentation, and literature review at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of West Lombok Regency. The data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.* ***Result:*** *The findings indicate that the optimization of entertainment tax revenue through the implementation of tapping box has been carried out fairly well but has not yet reached an optimal level. In the objective dimension, tapping box has improved transaction transparency and supported revenue growth, although revenue realization remains fluctuating. In the alternative decision dimension, the Regional Revenue Agency has conducted problem identification, taxpayer socialization, and monitoring activities, but supervision and evaluation still require improvement. In the limited resources dimension, regulatory support, infrastructure, and stakeholder cooperation serve as supporting factors, while limited human resources, network disruptions, uneven device installation, and low taxpayer compliance remain significant obstacles.* ***Conclusion:*** *The study concludes that tapping box has contributed to the optimization of entertainment tax revenue in West Lombok Regency. Nevertheless, further improvements in*

supervision, technological infrastructure, and taxpayer compliance are required to maximize its contribution to Local Own-Source Revenue (PAD).
Keywords: *Entertainment Tax, Local Revenue, Optimization, Tapping Box, Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Pajak hiburan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas pemungutan pajak. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menerapkan sistem *tapping box* sebagai alat perekam transaksi wajib pajak secara otomatis. Meskipun demikian, realisasi penerimaan pajak hiburan masih menunjukkan fluktuasi dan belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan *tapping box* belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada efektivitas *tapping box* terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang mengkaji optimalisasi penerimaan pajak hiburanmelalui penerapan *tapping box* pada tingkat kabupaten masih terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan *tapping box* di Kabupaten Lombok Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Barat. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan tapping box di Kabupaten Lombok Barat telah berjalan cukup baik, namun belum mencapai kondisi yang optimal. Pada dimensi tujuan, penerapan tapping box berkontribusi terhadap peningkatan transparansi transaksi dan penerimaan pajak hiburan, meskipun realisasi penerimaan masih berfluktuasi dan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Pada dimensi alternatif keputusan, Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan identifikasi permasalahan, sosialisasi kepada wajib pajak, serta monitoring terhadap penggunaan tapping box, namun pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada dimensi sumber daya yang terbatas, dukungan regulasi, sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan pihak terkait menjadi faktor pendukung implementasi tapping box. Adapun keterbatasan sumber daya manusia, gangguan jaringan, belum meratanya pemasangan perangkat, dan rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi penerimaan pajak hiburan. **Kesimpulan:** Penerapan *tapping box* telah berkontribusi dalam optimalisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Lombok Barat. Namun, diperlukan peningkatan pengawasan, infrastruktur teknologi, dan kepatuhan wajib pajak agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih optimal.
Kata Kunci: Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah, Optimalisasi, *Tapping Box*, Kepatuhan Pajak.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan keuangan daerah secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Pajak daerah merupakan komponen utama PAD yang memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam sistem pemungutan dan pengawasan pajak agar penerimaan daerah dapat dioptimalkan.

Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar, terutama dari sektor jasa dan hiburan. Pajak hiburan menjadi salah satu jenis pajak daerah yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD karena perkembangan industri pariwisata mendorong meningkatnya aktivitas usaha hiburan. Namun demikian, data PAD Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa target penerimaan daerah belum sepenuhnya tercapai dalam beberapa tahun terakhir. Target PAD meningkat dari Rp281,81 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp406,46 miliar pada tahun 2024, tetapi realisasinya masih mengalami kesenjangan terhadap target yang ditetapkan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum tergali secara optimal.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pemungutan pajak daerah adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, ketidaksesuaian pelaporan omzet, serta keterbatasan pengawasan terhadap transaksi usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menerapkan tapping box sebagai alat perekam transaksi elektronik yang terhubung dengan sistem pengawasan pajak daerah. Tapping box berfungsi merekam transaksi secara otomatis sehingga diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemungutan pajak hiburan.

Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya bertujuan meningkatkan efektivitas, akurasi, dan transparansi pelayanan publik. Penelitian Restu menjelaskan bahwa implementasi sistem digital dalam administrasi pemerintahan mampu mendukung tertib administrasi, meningkatkan kualitas pengelolaan data, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan (Sasongko, 2023). Oleh karena itu, penerapan tapping box dapat dipandang sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan daerah dalam mendukung optimalisasi pengelolaan dan pengawasan penerimaan pajak daerah.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah. Penggunaan tapping box berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penguatan sistem monitoring transaksi (Ratnawati et al., 2023). Modernisasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

melalui peningkatan transparansi, kemudahan pelaporan, dan efektivitas pengawasan pajak (Night & Bananuka, 2019). Selain itu, penelitian Noviyanti menyimpulkan bahwa penggunaan tapping box mampu meningkatkan akurasi pelaporan dan memperkuat pengawasan penerimaan pajak daerah(Noviyanti, 2022) . *Tapping box* merupakan alat perekam transaksi yang efektif digunakan sebagai instrumen monitoring pajak daerah(Rafika & Limarjani, 2023). Sementara itu penelitian terdahulu menegaskan bahwa peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan PAD daerah (Mailindra, 2023).

Meskipun demikian, berbagai penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada efektivitas tapping box, kepatuhan wajib pajak, dan pengawasan pajak daerah secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan tapping box pada tingkat pemerintah kabupaten, khususnya di Kabupaten Lombok Barat, masih relatif terbatas. Di sisi lain, berdasarkan data yang terdapat dalam penelitian ini, realisasi penerimaan pajak hiburan setelah penerapan tapping box masih menunjukkan fluktuasi dan belum mencapai hasil yang optimal. Bahkan setelah tahun 2022 masih terjadi volatilitas penerimaan yang mengindikasikan adanya kendala teknis, administratif, maupun perilaku wajib pajak yang belum sepenuhnya teratasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tapping box saja belum cukup untuk menjamin optimalisasi penerimaan pajak hiburan.

Volatilitas penerimaan pajak hiburan pasca penerapan tapping box menunjukkan perlunya upaya optimalisasi yang lebih komprehensif melalui penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur teknologi, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian mengenai Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Melalui Penerapan Tapping Box di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi tingkat optimalisasi yang telah dicapai, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada permasalahan belum optimalnya penerimaan pajak hiburan melalui penerapan tapping box di Kabupaten Lombok Barat. Pajak hiburan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, khususnya di Kabupaten Lombok Barat yang memiliki potensi pariwisata dan usaha hiburan yang cukup berkembang. Dalam upaya meningkatkan transparansi transaksi dan efektivitas pengawasan pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menerapkan sistem tapping box pada sejumlah objek pajak hiburan. Namun demikian, meskipun penggunaan teknologi tersebut telah berjalan, realisasi penerimaan pajak hiburan masih menunjukkan fluktuasi dan belum selalu mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan tapping box. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih adanya gangguan teknis, seperti ketidakstabilan jaringan internet dan permasalahan pada perangkat yang

dapat menghambat proses perekaman transaksi secara real time. Kondisi tersebut menyebabkan data transaksi yang tercatat belum sepenuhnya mencerminkan aktivitas usaha yang sebenarnya sehingga berpotensi memengaruhi akurasi pengawasan pajak daerah. Selain itu, belum seluruh wajib pajak hiburan terpasang perangkat tapping box sehingga pengawasan transaksi belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mendukung implementasi tapping box. Meskipun sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi pelaporan pajak, masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya mendukung penerapannya karena berbagai alasan, seperti kekhawatiran terhadap pengawasan transaksi usaha maupun keterbatasan pemahaman mengenai manfaat penggunaan tapping box. Di sisi lain, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas pelaksanaan sistem tersebut.

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang memengaruhi optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Perkembangan kondisi ekonomi, perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap layanan hiburan, serta dinamika sektor pariwisata dapat berdampak pada jumlah transaksi usaha hiburan yang pada akhirnya memengaruhi penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya penyesuaian agar penerapan tapping box tetap mampu mendukung peningkatan penerimaan pajak hiburan secara berkelanjutan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penerapan tapping box dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pengawasan pajak daerah, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan tapping box pada tingkat pemerintah kabupaten. Penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada aspek efektivitas penggunaan teknologi atau pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga belum banyak penelitian yang menganalisis penerapan tapping box dari perspektif optimalisasi dengan memperhatikan dimensi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tingkat optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan tapping box di Kabupaten Lombok Barat, termasuk faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena pajak hiburan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Lombok Barat. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan, pemerintah daerah telah menerapkan tapping box sebagai alat perekam transaksi yang mendukung transparansi dan pengawasan pajak. Namun, realisasi penerimaan pajak hiburan masih mengalami fluktuasi dan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai optimalisasi penerapannya.

Penelitian ini memiliki urgensi praktis, penelitian ini juga penting secara akademis karena penelitian mengenai optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan tapping box pada tingkat pemerintah kabupaten masih relatif terbatas. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan tapping box berpotensi tidak teridentifikasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak hiburan dan kontribusinya terhadap PAD.

1.4 Penelitian Terdahulu

Kajian dalam penelitian ini didasarkan pada sejumlah penelitian terdahulu yang membahas pemanfaatan *tapping box* dalam pengelolaan pajak daerah. Ratnawati mengemukakan bahwa penggunaan teknologi tapping box mampu mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ratnawati et al., 2023). Sementara itu, Noviyanti menjelaskan bahwa tapping box membantu pemerintah daerah memperoleh data transaksi yang lebih akurat untuk mendukung pengawasan pajak (Noviyanti, 2022) . Penelitian Rafika dan Limarjani menunjukkan bahwa tapping box efektif digunakan sebagai instrumen monitoring pajak daerah, sedangkan menegaskan bahwa keberhasilan implementasinya dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, kualitas pengawasan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak (Rafika & Limarjani, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dan Rinanda (2024) berjudul *Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang* menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak hiburan telah dilaksanakan sesuai ketentuan melalui mekanisme self assessment system, namun masih ditemukan kendala berupa rendahnya pemahaman wajib pajak dalam proses pelaporan serta rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Aisyah & Rinanda, 2024). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menyoroti aspek efektivitas penerapan tapping box dan kepatuhan wajib pajak, sehingga masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan tapping box dengan menggunakan perspektif teori optimalisasi.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan tapping box di Kabupaten Lombok Barat. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada efektivitas penerapan tapping box atau pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini mengkaji penerapan tapping box dari perspektif teori optimalisasi yang meliputi dimensi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang terbatas. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi implementasi tapping box, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan penggunaan teknologi dalam pengawasan pajak,

tetapi juga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses optimalisasi penerimaan pajak hiburan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan *tapping box* di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, sedangkan analisis data dilakukan secara induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2019). Sejalan dengan itu, Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data deskriptif yang diperoleh dari pengalaman dan pandangan informan (Creswell, 2014).

Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menganalisis optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan tapping box di Kabupaten Lombok Barat, serta mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, dan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan tapping box dalam mendukung penerimaan pajak hiburan berdasarkan kondisi yang terjadi secara nyata di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teori optimalisasi yang dikemukakan oleh Siringoringo sebagai landasan analisis. Teori tersebut menjelaskan bahwa optimalisasi merupakan proses untuk memperoleh hasil terbaik melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien (Siringoringo, 2005). Dalam penelitian ini, analisis dilakukan berdasarkan tiga dimensi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang terbatas. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan tapping box di Kabupaten Lombok Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, sebagaimana dijelaskan oleh (Simangunsong, 2017) bahwa induktif berarti data dan fakta dalam penelitian harus berasal dari informasi dan data yang spesifik, lalu dianalisis untuk menghasilkan generalisasi yang lebih luas dan bersifat umum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Barat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan penerimaan pajak hiburan, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan serta pengawasan tapping box di Kabupaten Lombok Barat.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 2014). Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara induktif berdasarkan dimensi teori optimalisasi Siringoringo sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan tapping box di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan penelitian meliputi tahap observasi awal, pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan tapping box di Kabupaten Lombok Barat menggunakan teori optimalisasi yang dikemukakan oleh Siringoringo. Menurut Siringoringo (2005), optimalisasi merupakan proses untuk memperoleh hasil terbaik melalui pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, optimalisasi dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang terbatas. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana penerapan tapping box mampu mendukung peningkatan penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Lombok Barat.

Penerapan tapping box merupakan salah satu bentuk inovasi dalam administrasi perpajakan daerah yang bertujuan meningkatkan transparansi transaksi usaha dan memperkuat pengawasan terhadap pelaporan pajak. Kehadiran sistem ini diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran penerimaan pajak serta meningkatkan akurasi data transaksi wajib pajak. Menurut Budiantari, pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Budiantari, 2022). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan teknologi pengawasan menjadi salah satu langkah yang penting untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

Keberhasilan penerapan tapping box tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya, serta ketersediaan sumber daya pendukung. Faktor-faktor tersebut meliputi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, kesiapan sumber daya manusia, dukungan regulasi, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, analisis berdasarkan dimensi tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang terbatas menjadi penting untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan

tapping box di Kabupaten Lombok Barat. Adapun pembahasan hasil penelitian disajikan pada subbab berikut.

3.1 Tujuan

Secara analitis, penerapan tapping box telah mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah karena transaksi wajib pajak dapat dipantau secara lebih akurat dan real time. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Sinurat yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berorientasi pada efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah (Sinurat, 2017). Dengan demikian, penerapan tapping box menjadi salah satu instrumen yang mendukung terwujudnya tata kelola pajak daerah yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan tapping box telah memberikan manfaat dalam mendukung pencapaian tujuan optimalisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Lombok Barat. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat menyatakan bahwa "dengan adanya alat ini, setiap transaksi usaha hiburan dapat terekam secara otomatis dan real time sehingga memudahkan dalam pengawasan serta meminimalisir potensi kecurangan dalam pelaporan omzet". Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa "tapping box juga membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pemungutan pajak karena petugas tidak perlu lagi melakukan pengecekan secara manual ke lapangan secara terus-menerus". Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan tapping box telah mendukung peningkatan transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak hiburan.

Tujuan optimalisasi penerimaan pajak hiburan belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat mengemukakan bahwa "penerapan tapping box masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan jaringan internet di beberapa lokasi usaha, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap penggunaan alat, serta masih adanya resistensi dari sebagian pelaku usaha". Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang PBJT dan Pajak Air Tanah menyatakan bahwa "dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti belum meratanya pemasangan alat serta hambatan teknis dan pemahaman wajib pajak yang masih terbatas". Meskipun demikian, dari aspek efisiensi biaya, waktu, dan jarak, penerapan tapping box dinilai cukup membantu karena "data transaksi dapat dipantau secara langsung tanpa harus melakukan pengecekan ke lokasi usaha secara terus-menerus" sehingga "pengawasan dapat dilakukan secara terpusat".

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak hiburan tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kepatuhan wajib pajak yang memadai. Temuan ini sejalan dengan Erlambang dan Tumija yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan harus didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai, serta pengelolaan sistem yang berkelanjutan agar dapat menghasilkan pelayanan dan pengawasan yang efektif (Erlambang & Tumija, 2023). Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penerapan tapping box.

3.2 Alternatif Keputusan

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi alternatif keputusan menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan tapping box. Alternatif keputusan yang dilakukan meliputi identifikasi permasalahan, pelaksanaan sosialisasi kepada wajib pajak, serta kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan perangkat tapping box. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat menyatakan bahwa "kami terus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak agar mereka memahami manfaat dan tata cara penggunaan tapping box sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif." Selain itu, beliau juga menjelaskan bahwa "setiap kendala yang muncul di lapangan kami identifikasi terlebih dahulu untuk menentukan langkah penyelesaian yang paling sesuai dengan kondisi yang dihadapi."

Upaya memperkuat pelaksanaan tapping box, Bapenda Kabupaten Lombok Barat juga melakukan monitoring secara berkala terhadap perangkat yang telah terpasang. Kepala Bidang PBJT dan Pajak Air Tanah menjelaskan bahwa "monitoring dilakukan untuk memastikan alat berfungsi dengan baik dan data transaksi dapat masuk ke sistem secara optimal." Beliau juga menyampaikan bahwa "apabila ditemukan kendala teknis atau laporan dari wajib pajak, kami segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan tindak lanjut." Meskipun berbagai alternatif keputusan telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan evaluasi masih perlu ditingkatkan agar penerapan tapping box dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Lombok Barat.

Berbagai alternatif keputusan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Lombok Barat menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi tapping box melalui sosialisasi, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pendapat Decky Dwi Utomo yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam melakukan koordinasi, pengawasan, dan penyesuaian terhadap berbagai permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaannya (Utomo et al., n.d.). Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak hiburan.

3.3 Sumber Daya Yang Membatasi

Berdasarkan hasil penelitian, dimensi sumber daya yang membatasi menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan tapping box dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaannya. Dari aspek pendukung, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah memiliki dasar regulasi yang jelas, dukungan sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan pihak terkait dalam pengoperasian perangkat tapping box. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat menyatakan bahwa "penerapan tapping box didukung oleh regulasi yang berlaku serta kerja sama dengan Bank NTB dan PT Cartenz Technology sebagai penyedia perangkat sehingga pelaksanaan pengawasan transaksi dapat berjalan lebih baik." Dukungan tersebut menjadi modal penting dalam menunjang pelaksanaan pengawasan pajak hiburan secara lebih transparan dan akuntabel.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak hiburan. Jumlah petugas yang menangani pengawasan dan pemantauan tapping box masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang harus diawasi. Kepala Bidang PBJT dan Pajak Air Tanah menjelaskan bahwa "jumlah petugas yang tersedia masih terbatas sehingga pengawasan terhadap seluruh wajib pajak belum dapat dilakukan secara maksimal." Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya proses monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan tapping box di lapangan.

Selain keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis berupa gangguan jaringan internet dan belum meratanya pemasangan perangkat tapping box juga menjadi faktor penghambat. Beberapa lokasi usaha masih mengalami kendala konektivitas sehingga data transaksi tidak selalu dapat terkirim secara real time. Di samping itu, tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan tapping box. Kepala Bidang PBJT dan Pajak Air Tanah mengemukakan bahwa "masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya penggunaan tapping box sehingga diperlukan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan." Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak hiburan tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kepatuhan wajib pajak yang memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak hiburan tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kepatuhan wajib pajak yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak hiburan tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kepatuhan wajib pajak yang memadai. Hal tersebut sejalan dengan Asri, Tumija, dan Eko yang menjelaskan bahwa pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah memerlukan dukungan kapasitas aparatur yang memadai agar teknologi dapat digunakan secara efektif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif (Asri et al., 2025). Temuan ini sejalan dengan Erlambang dan Tumija yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan harus didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur yang memadai, serta pengelolaan sistem yang berkelanjutan agar dapat menghasilkan pelayanan dan pengawasan yang efektif (Erlambang & Tumija, 2023). Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penerapan tapping box.

Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang mendukung, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sinurat menyatakan bahwa kapasitas aparatur, ketersediaan sarana pendukung, serta kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Sinurat, 2018). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas infrastruktur perlu terus dilakukan untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan tapping box.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan menarik bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala dalam penerapan tapping box guna mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi secara berkala, serta penguatan koordinasi dengan pihak terkait. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan

pemahaman wajib pajak mengenai manfaat tapping box sekaligus mendorong kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak hiburan. Berikut merupakan hasil observasi peneliti terhadap upaya yang dilakukan pemerintah guna mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan.

Tabel 3.4
Penguatan Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi Penerapan Tapping Box

No	Aspek Pengawasan	Kondisi yang Terjadi
1	Pengawasan berkala	Dilakukan untuk memastikan transaksi usaha tercatat sesuai kondisi riil
2	Monitoring data transaksi	Data transaksi dipantau secara real time melalui system tapping box
3	Evaluasi pelaksanaan	Dilakukan untuk mengetahui hambatan dan efektivitas penerapan sistem
4	Deteksi penyimpangan	Membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian pelaporan pajak
5	Transparansi pengelolaan pajak	Penggunaan tapping box meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan transaksi usaha

Sumber: Hasil wawancara dan observasi peneliti,2026

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa penguatan pengawasan, monitoring, dan evaluasi menjadi salah satu upaya penting yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan melalui penerapan tapping box. Pengawasan dan monitoring yang dilakukan secara berkala membantu pemerintah daerah memastikan transaksi usaha tercatat secara akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya mengatasi kendala teknis yang sering terjadi melalui peningkatan kualitas sistem dan pemeliharaan perangkat tapping box. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat menyatakan bahwa "kami terus berkoordinasi dengan pihak penyedia perangkat untuk memastikan tapping box dapat berfungsi dengan baik serta segera menangani apabila terjadi gangguan pada sistem maupun jaringan". Upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan operasional tapping box agar data transaksi wajib pajak dapat terekam secara optimal. Temuan ini sejalan dengan Rafika dan Limarjani yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi tapping box tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh dukungan pemeliharaan sistem dan pengawasan yang berkelanjutan(Rafika & Limarjani, 2023).

Temuan lainnya menunjukkan bahwa Bapenda Kabupaten Lombok Barat tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga membangun pendekatan persuasif kepada wajib pajak. Kepala Bidang PBJT dan Pajak Air Tanah menjelaskan bahwa "sosialisasi dan pembinaan terus dilakukan agar wajib pajak memahami bahwa tapping box bukan untuk memberatkan usaha mereka, melainkan untuk menciptakan transparansi dalam pelaporan pajak". Dengan demikian, upaya yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya bertujuan mengatasi hambatan teknis, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga penerapan tapping box dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap peningkatan penerimaan pajak hiburan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak hiburan melalui penerapan tapping box di Kabupaten Lombok Barat telah terlaksana dengan cukup baik, namun belum mencapai kondisi yang optimal. Pada dimensi tujuan, penerapan tapping box telah membantu meningkatkan transparansi transaksi dan mendukung peningkatan penerimaan

pajak hiburan, meskipun realisasi penerimaan masih berfluktuasi dan belum selalu mencapai target yang ditetapkan. Pada dimensi alternatif keputusan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat telah melakukan berbagai upaya, seperti identifikasi permasalahan, sosialisasi kepada wajib pajak, serta monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan tapping box. Sementara itu, pada dimensi sumber daya yang membatasi, implementasi tapping box didukung oleh regulasi, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan pihak terkait, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, gangguan jaringan, belum meratanya pemasangan perangkat, dan rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan, memperkuat pengawasan, serta meningkatkan koordinasi dengan pihak penyedia perangkat guna mendukung efektivitas penerapan tapping box.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada penerapan tapping box pada objek pajak hiburan di Kabupaten Lombok Barat sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan optimalisasi penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada pemahaman fenomena dan proses implementasi sehingga tidak mengukur besaran pengaruh penerapan tapping box terhadap peningkatan penerimaan pajak secara statistik.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan tapping box pada berbagai jenis pajak daerah lainnya, seperti pajak restoran, hotel, dan parkir, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penggunaan teknologi dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah. Selain itu, penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur pengaruh penerapan tapping box terhadap peningkatan penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak secara lebih terukur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, data, serta kesempatan kapada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, keluarga, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, & Rinanda, Y. (2024). Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, *1*(3 SE-Articles), 121–131. https://doi.org/10.62194/nqpfv632

Asri, J., Tumija, T., Lestari, E., Agustina, I., Zulkarnaen, A., Abdillah, M., & Wauran, A. (2025). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Kecamatan Melalui Pendampingan

SIPD RI <sup> </sup. *Madani : Indonesian Journal of Civil Society*, *7*, 112–121. https://doi.org/10.35970/madani.v7i2.2505

Budiantari, S. E. S. (2022). *Administrasi Perpajakan Daerah*. RTUJUH MEDIA PRINTING.

Creswell, J. W. (2014). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.

Erlambang, P. A., & Tumija. (2023). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat salah satu tugas dan fungsi pemerintah Pengelolaan keuangan dae*. https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696

Mailindra, W. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Penerimaan Pajak Daerah, Dan Retribusi Daerah Provinsi Jambi Periode 2006-2021. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, *4*(2 SE-Articles), 89–95. https://doi.org/10.32939/fdh.v4i2.2868

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.

Night, S., & Bananuka, J. (2019). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, *25*(49), 73–88. https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066

Noviyanti, A. M. (2022). *Analysis of the Application of Tapping Box as an Effort to Monitor Restaurant Tax Revenue in Sukoharjo Regency*. *1*(2), 122–134. https://doi.org/10.20961/akumulasi.v1i2.335

Rafika, L., & Limarjani, S. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Tapping Box Sebagai Monitoring Pajak Daerah (Studi Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, Dan Parkir). *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *6*(2 SE-Articles), 288–299. https://doi.org/10.34128/jra.v6i2.183

Ratnawati, J., Sumaryati, A., Mardjono, E. S., & Oktafiyani, M. (2023). Do Tapping Box Technology Increase Local Taxes and District Own Source Revenue? *Jurnal Akuntansi*. https://doi.org/10.33369/jakuntansi.13.3.216-228

Sasongko, R. W. (2023). *Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung*. *5*(April), 69–86. https://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1286/1/3148-Article Text-15062-1-10-20230906.pdf

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan : Teoritik - Legislatik - Empirik - Inovatif*.

Sinurat, M. (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*.

Sinurat, M. (2018). *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Siringoringo, H. (2005). Seri Teknik Riset Operasional Pemrograman Linear. In *Yogyakarta: Graha Ilmu*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Utomo, D. D., Pangemanan, A., & Tumija. (n.d.). *Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Dalam Menjamin Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara*. 74–101. https://doi.org/10.33701/jekp.v8i2.2781